

Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2019-2023

Sabita Maghfirah¹, Emi Masyitah²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Potensi Utama Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received Nov 04, 2025

Revised Nov 16, 2025

Accepted Nov 25, 2025

Keywords:

Jumlah Penduduk

Inflasi

Produk Domestik Regional Bruto

Pajak Daerah

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of population, inflation, and Regional Gross Domestic Product (GDP) on local tax revenue in Medan City in the period of 2019 to 2023. Local tax is one of the main sources of income of the local government which is greatly influenced by macroeconomic and demographic conditions. This research uses a quantitative approach with secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and other related agencies. The analysis technique used is multiple linear regression, with the help of SPSS software version 25. The analysis results show that simultaneously, population variables, inflation, and PDRB have a significant effect on local tax revenue. Partially, the population and PDRB show a positive and significant effect, which means that the greater the population and PDRB, the more local tax revenue tends to increase. Meanwhile, inflation shows a negative effect on local tax revenue, although it is not always statistically significant. This indicates that high price fluctuations can reduce people's purchasing power and hinder economic activity, which ultimately has an impact on a decrease in tax revenue. By understanding the influence of these three variables, local governments are expected to be able to design fiscal policies that are more responsive to economic and demographic dynamics, in order to optimize the potential for regional tax revenue in a sustainable manner. This research also provides empirical contributions in the study of regional economics, especially in the context of regional financial management.



Corresponding Author:

Sabita Maghfirah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Potensi Utama

Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No. 3A Sumatera Utara 20241. Indonesia

Email: maghfirahsabita@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Untuk menghadapi variasi tersebut, pembangunan yang lebih menyeluruh perlu diterapkan di masing-masing daerah. Pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari konteks pembangunan daerah, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan setiap daerah dapat memahami dan memanfaatkan potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan lokal (Fitri, 2021).

Pajak daerah merupakan sumbangan yang wajib dibayarkan oleh individual atau badan kepada pemerintah daerah, yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang. Kontribusi ini tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi mencapai kemakmuran masyarakat. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak yang dibayarkan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pemerintahan dan kepentingan umum. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang

menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar jumlah pajak dan retribusi yang diterima, semakin menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kota Medan misalnya, adalah salah satu kota di Sumatera Utara yang memiliki tingkat pajak dan retribusi yang tergolong tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya di wilayah tersebut (Pratiwi, 2021).

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah kota Medan dari tahun 2019 sampai 2023 belum ada yang mencapai target dan cenderung mengalami penurunan serta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, realisasi mencapai Rp1.472,41M dari target sebesar Rp1.727,10M dengan capaian 85,25%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (tidak disajikan dalam tabel), dan menjadi titik awal dari tren naik atau turun di tahun-tahun berikutnya. Realisasi terendah dari target yaitu pada tahun 2020 dengan target 1.944,85M dan terealisasi sebesar 1.195,85M yaitu sejumlah 61,49% yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak. Dengan demikian, berdasarkan tabel dan fenomena realisasi pajak daerah Kota Medan selama 5 tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pajak daerah Kota Medan belum efektif dikarenakan target pajak daerah cenderung menurun setiap tahun dan berfluktuasi, maka hal ini perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan dan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah agar target yang ditetapkan lebih realistis dan pencapaiannya lebih konsisten.

Menurut Saputra et al. (2014) Perkembangan jumlah penduduk memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah, potensi akan meningkatnya jumlah wajib pajak juga semakin besar. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah jumlah penduduk. Dirjen Pajak, Fuad Rahmany (2014), menekankan bahwa penurunan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penerimaan negara yang seiring dengan meningkatnya konsumsi di masyarakat. Walaupun menurut Sari & Ilyas (2019) dimana hasil penemuannya menunjukkan bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak dapat bervariasi tergantung pada karakteristik daerah dan kondisi ekonominya.

Selain itu, menurut Clark dan Lawson (2004), pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB meningkatkan kemampuan fiskal suatu daerah. Peningkatan PDRB biasanya diikuti oleh peningkatan pendapatan per kapita, sehingga daya beli masyarakat meningkat. Daya beli yang tinggi akan mendorong konsumsi dan investasi lokal yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2. METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebuah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, yang bertujuan untuk meneliti suatu populasi atau sampel, data dikumpulkan menggunakan instrument penelitian, analisis data sifatnya statistik/kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2017). Berdasarkan pada rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan asosiatif. Rumusan masalah Asosiatif yaitu rumusan masalah dalam penelitian yang sifatnya mempertanyakan kaitan di antara dua variabel atau lebih.

Populasi

Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah seluruh data tahunan yang mencakup pajak daerah, jumlah penduduk, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Kota Medan.

Sampel

Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah seluruh data yang mencakup pajak daerah, jumlah penduduk, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Kota Medan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2019-2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			60
Normal	Mean		.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation		.02730054
Most Extreme Differences	Absolute		.069
	Positive		.039
	Negative		-.069
Test Statistic			.069
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
	Sig.		.675
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	99% Lower Bound		.663
	Confidence Interval Upper Bound		.687

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 dan nilai Monte Carlo Sig. sebesar 0,675, yang keduanya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti residual dari model regresi menyebar secara normal.

b) Uji Multikolineritas

Tabel 2. Uji Multikolineritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Jumlah Penduduk	.845	1.184
	Inflasi	.998	1.002
	PDRB	.845	1.183

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil uji multikolineritas yang ditunjukkan pada tabel Coefficients, Semua nilai VIF tersebut berada jauh di bawah batas maksimum 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki hubungan korelasi yang tinggi satu sama lain (tidak terjadi multikolineritas).

c) Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.019	.039		.484	.630
	Jumlah Penduduk	-.009	.045	-.029	.202	.841
	Inflasi	.043	.144	.040	.298	.767
	PDRB	.017	.029	.087	.601	.550

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode Glejser, diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, model regresi yang digunakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 ^a	.981	.980	.028022	2.202

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi yang ditunjukkan pada tabel Model Summary, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,202 dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala autokorelasi baik positif maupun negatif. Artinya, residual dalam model bersifat independen atau tidak saling berkorelasi antar periode pengamatan.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Std. Error Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	1.170	.068	17.133	.001
	Jumlah Penduduk	.656	.078	8.457	.001
	Inflasi	.579	.249	2.323	.024
	PDRB	2.248	.050	44.849	.001

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditulis, model penelitian secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 1.170 - 0.656 X_1 - 0.579 X_2 + 2.248 X_3$$

Keterangan:

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu jumlah penduduk, inflasi, dan PDRB, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Di antara ketiganya, PDRB merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi pajak daerah karena memiliki koefisien regresi paling besar dan tingkat signifikansi yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin melalui PDRB memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dibandingkan variabel lainnya.

3. Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Std. Error Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	1.170	.068	17.133	.001
	Jumlah Penduduk	.656	.078	8.457	.001
	Inflasi	.579	.249	2.323	.024
	PDRB	2.248	.050	44.849	.001

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel uji parsial diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel jumlah penduduk memiliki koefisien regresi sebesar 0,656 dengan nilai t hitung sebesar 8,457 dan nilai signifikansi $<0,001$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk, maka potensi penerimaan pajak daerah juga meningkat, karena bertambahnya jumlah wajib pajak dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Variabel inflasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,579 dengan nilai t hitung sebesar 2,323 dan nilai signifikansi 0,024. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka inflasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Artinya, kenaikan tingkat inflasi dalam batas tertentu dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah, misalnya melalui kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak pada kenaikan nilai transaksi dan basis pajak. Namun, pengaruh inflasi ini tidak sebesar variabel lainnya, sehingga kontribusinya relatif lebih kecil.
3. Variabel PDRB memiliki koefisien regresi terbesar yaitu 2,248 dengan nilai t hitung sebesar 44,849 dan nilai signifikansi $<0,001$. Nilai ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh sangat signifikan terhadap pajak daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai PDRB sebagai cerminan aktivitas ekonomi suatu daerah, maka semakin besar pula penerimaan pajak yang diperoleh. PDRB terbukti menjadi variabel yang paling dominan dalam memengaruhi pajak daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk maupun inflasi.

b) Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.222	3	.741	943.293	,001 ^b
	Residual	.044	56	.001		
	Total	2.266	59			

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil uji F (simultan) yang ditampilkan pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 943,293 dengan tingkat signifikansi $<0,001$. Nilai signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari jumlah penduduk, inflasi, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu pajak daerah.

c) Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 8. Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.990 ^a	.981	.980	.028022	2.202	

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data tabel diatas, nilai Adjusted R Square sebesar 0,980 yang hampir sama dengan nilai R^2 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami bias meskipun terdapat lebih dari satu variabel independen. Dengan kata lain, model yang digunakan sudah cukup baik dan mampu menjelaskan variasi data secara konsisten.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, serta uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian mengenai pengaruh jumlah penduduk, inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pajak daerah Kota Medan tahun 2019–2023. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Medan. Secara teoritis, semakin

banyak jumlah penduduk maka semakin besar pula jumlah wajib pajak, baik dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak konsumsi, maupun pajak lain yang dikelola pemerintah daerah. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Medan. Secara teori, inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak karena harga barang dan jasa naik, sehingga nilai transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak juga meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Medan. PDRB adalah faktor dominan dalam memengaruhi penerimaan pajak daerah. PDRB mencerminkan total aktivitas ekonomi masyarakat dalam suatu daerah. Jumlah Penduduk, Inflasi, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Medan karena model regresi yang digunakan memiliki daya jelaskan yang sangat tinggi dan layak digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, B. (2020). *Teori Kependudukan*. Bogor: Lindan Bestari.
- Aji, F. B., & SBM, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1). <https://doi.org/10.14710/djoe.29995>
- Arianto, P. S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya. *JIRA Journal*, 3(1).
- Barro, R. J. (1996). "Democracy and Growth", dalam *Journal of Economic Growth*.
- Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, Pdrb, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Barat. *Analisis Pengaruh Investasi, Pdrb, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Barat*, 11(1).
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Fitri, N. (2021). *Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Gumpita, L. N. (2013). Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990-2011. *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Semarang Tahun 1990-2011*, 2(2).
- Halim, Abdul, Bawono, Ranga, B. dan D. A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haniz, N. F., & Sasana, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal. *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1). Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Pustaka Sakti.
- Indra Mahardika, P. (2017). *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty* (Edisi : Ta). Yogyakarta: Qiurdant.
- Ineke Putri, P. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *Jejak: Journal of Economics and Policy*, 5(2). <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Iqbal Anugerah Berutu, M., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4).
- Jamaluddin. (2011). *Pengantar Perpajakan*. Makasar: Alauddin Press.
- Kedannnews.com. (2024). BKAD Sebut Realisasi Pajak Daerah Kota Medan Tumbuh 16,48 Persen.
- Kresnandra, A., & Erawati, N. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3).
- Lumy, D. G., Kindangen, P., Engka, D. S. M., Ratulangi, U. S., Penduduk, J., & Daerah, P. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara |Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.2 (2018). *Akuntansi Dan Pembangunan*, 19(2).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Kedu). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Marliyanti, D. S., & Arka, S. (2014). Pengaruh Pdrb Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, 3(6).
- Meita, I., & Nurdiniah, D. N. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pph Badan, Inflasi Dan Suku Bunga. *KIA 10: Konferensi Ilmiah Akuntansi X*.
- Mulyadi. (2017). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo. (2016). (Skripsi) *Analisis pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Pdrb Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah (tahun 2011-2014)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prasetyo, S. I. (2014). (Skripsi) *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, Dan Pdrb Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Pratiwi, L. W. (2021). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2015-2019*. Institut Agama Islam Negeri Ponogoro.
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro* (Cetakan I). Depok: Rajawali Persada.
- Priyono, D., & Retno Handayani, H. (2021). Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 -2018. *Jurnal Ekonomi*, 10(1).
- Putri, L. R. (2020). Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan Pdrb Kota Surakarta. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan Pdrb Kota Surakarta*, 21(1).
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Jejak*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>
- Rahmany, F. (2014). Inflasi Melambat, Penerimaan Pajak Diyakini Lebih Baik Dari 2013.
- Rakhmadhani, M. R. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kesenjangan Antar Daerah dan Pembiayaan Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2). Retrieved from <https://doi.org/10.22219/jie.v2i2.7036>
- Razali, R. (2017). *Bunga Rampai Kependudukan kelahiran, Kematian, Migrasi dan Pembangunan Berwawasan Kependudukan*. Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press Darussalam.
- Refrian, A. (Universitas B. (2021). *Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2019*. Universitas Brawijaya Malang.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 8). Jakarta: Salemba Empat.
- Romadhini, S. A., & Utomo, S. H. (2022). The Impact Of Tax Increases, Inflation, and Government Capital Expenditure On Growth The Economy in Indonesia From The Year 2006 Until 2021. *Amnesty:Jurnal Riset Perpajakan*, 05(02). Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrpamnesty/article/view/9342%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/download/9342/5421>
- Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. , (2015). Indonesia.
- Valiant Kevin, A., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. (2022). Pengaruh Pdrb, Angka Harapan Hidup, Dan Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482>
- Wahyuni, S., & Andriyani, D. (2022). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhanekonomi Terhadapketimpangan Pendapatan Diprovinsiaceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(1). <https://doi.org/10.29103/jeru.v5i1.7919>
- Wandisyah, M., & Hutagalung, R. (2019). Pengaruh Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Dimoderasi Oleh Variabel Inflasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1).
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulfani, D. (2025). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Jumlah Industri Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2023*. U niversitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.